

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Ali. 2015. *Menguak Tabir Hukum Edisi Kedua*, Jakarta: Prenada Media Group
- Adrian Sutedi. 2008. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta:
- Ahmadi Miru. 2011. *Hukum Kontrak & Perancangan kontrak*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Arie S. Hutagalung. 2005. *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*. Jakarta: LPHI.
- Boedi Harsono. 1999. *Hukum Agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria. Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Boedi Harsono. 2018. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Penerbit Universitas Trisakti: Jakarta
- Bushar Muhammad, 1988, *Asas-Asas Hukum Adat suatu Pengantar*, penerbit Bina Cipta Bandung.
- Chainur Arrasjid. 2008. *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Darji Darmodiharjo & Sidarta, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Djamanat Samosir. 2013. *Hukum Adat Indonesia (Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia)*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Edi Ruchiyat, 1984, *Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA*, Bandung: Alumni.

- Emmy. Kabey, 1991, *Pemilikan Hak Ulayat Atas Perairan*, Jayapura; Percetakan UNCEN.
- Enembe, Lukas. Papua: *Antara Uang dan Kewenangan*. Jakarta: Wahana Semesta Intermedia, 2016
- Ismaya, Samun, 2013 *Hukum Administrasi Pertanahan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Hari Purwadi. 2004. *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Henky Ramandey, 1987, *Pengantar Ilmu Hukum Seri III: Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih*, Jayapura.
- Hilman Hadikusumo: 1994, *Hukum Perjanjian Adat*. Bandung: PT. Citra Adytia.
- Ida Nurlinda. 2013. *Profil Tanah di Tengah Kompleksitas Konflik*. Bandung: Lepsindo.
- Ihromi T.O. 1986. *Bianglala Hukum*. Bandung: Tarsito.
- Kansil C.S.T., 1984, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Lawrence M. Friedman. 1975 *The Legal System a Social Science Perspective*. (New York: Russel Sage Foundation. diterjemahkan oleh M. Khozim. 2009 *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Maria S.W Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005.
- Mochtar Kusumaatmadja. 2002. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Penerbit Alumni.

- Nasucha, Chaizi. *Politik Ekonomi Pertanahan dan Struktur Perpajakan atas Tanah*. Jakarta: Kesaint Blanc, 1994.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rachamadi Usman. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rusmadi Murad. 1991. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Bandung: Alumni.
- Sarkawi. 2014. *Hukum Pembebasan Tanah Hak Milik Adat Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Soedikno Mertokusumo. 2007. *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Soni Harsono. 1996. *Konflik Pertanahan dan Upaya-Upaya Penyelesaiannya*. Yogyakarta: Studium Generale.
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum Edisi Baru*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo. 2007. *Penemuan Hukum sebuah pengantar. Edisi ke-2 Cetakan ke-5*. Yogyakarta: Liberty.
- Sulastriyono. 1997. *Sengketa Penguasaan Tanah Timbul dan Proses Penyelesaiannya*. Tesis. Jakarta: Program Pasca Sarjana UI.
- Sumardjono, Maria S.W. *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007.

JURNAL

- Asrida Elisabeth. 2017. *Kala Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas Depapre dimulai (Bagian 1)*
<https://www.mongabay.co.id/2017/02/05/kala-pembangunan-pelabuhan-peti-kemas-depapre-dimulai-bagian-1/Jayapura>. 5 February 2017.
- Asrida Elisabeth. 2017. *Pemilik Ulayat Pertanyakan Kejelasan Perjanjian Bagi Hasil Pelabuhan Depapre (Bagian 2)*.
<https://www.mongabay.co.id/2017/02/18/pemilik-ulayat-pertanyakan-kejelasan-perjanjian-bagi-hasil-pelabuhan-depapre-bagian-2/>. Jayapura. 18 February 2017.
- Asrida Elisabeth. 2017. *Bangun Jalan sampai Pelabuhan Depapre: Bukit Terbongkar, Sungai Tertimbun (Bagian 3)*.
<https://www.mongabay.co.id/2017/03/03/bangun-jalan-sampai-pelabuhan-depapre-bukit-terbongkar-sungai-tertimbun-bagian-3/> Jayapura. 3 Maret 2017.
- Bao, Bonefasius. 2013. "Kuatnya Kekuasaan Ondoafi di Tengah Masyarakat Urban (Studi tentang Kekuasaan Ondoafi di Kota Jayapura Papua)." *Politika: Jurnal Ilmu Politik* (Vol. 1, No. 2, Mei 2013).
- Farida Patittingi. 2018. *Prinsip Keadilan Sosial Dalam Sistem Tenurial di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia*. diakses dari <http://www.jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/download/168/148>.
- Pustaka Virtual Tata Ruang dan Pertanahan (Pusvir TRP). *Implementasi Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*. diakses dari: <https://www.scribd.com/doc/242578978/implementasi-undang-undang-Nomor-2-Tahun2012-tentang-Pengadaan-Tanah-Bagi-Pembangunan-Untuk-Kepentingan-Umum#>.
- Rahmi Syarfina. *Pengaruh Hukum Adat dalam Proses Peralihan Hak Tanah Ulayat Pada Pembangunan Perluasan Bandara di Jayapura*. Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan Volume 1 Nomor 1 Januari 2019. Universitas Pancasila.
- Yunus Pajanjian Paulangan, Arsyad M. Al Amin, dan Yudi Wahyudin. 2018. *Identifikasi dan Strategi Pembangunan Mata Pencaharian Alternatif Masyarakat Lokal di Galon Kawasan Konservasi Perairan Teluk Depapre, Kabupaten Jayapura, Papua*. Laporan Penelitian Indonesia Marine Fellows Program. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum.

Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum.

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga diatas Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum. (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55).

Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 2016 tentang tata cara penetapan hak komunal atas tanah masyarakat hukum adat dan masyarakat dalam kawasan tertentu.

Peraturan Bupati Jayapura Nomor 13 Tahun 2006 tentang Kelayakan Lingkungan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas Depapre Kabupaten Jayapura.

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah.

Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Website

Asrida Elisabeth. 2017. *Pemilik Ulayat Pertanyakan Kejelasan Perjanjian Bagi Hasil Pelabuhan Depapre (Bagian 2)*. diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2017/02/18/pemilik-ulayat-pertanyakan-kejelasan-perjanjian-bagi-hasil-pelabuhan-depapre-bagian-2/>.

Badan Penghubungan Daerah Provinsi Papua di Jakarta. *Profil Wilayah Adat Mamta*. diakses dari: <https://penghubung.papua.go.id/5-wilayah-adat/mamta/>.

Portal Informasi Indonesia. 2019. *Provinsi Baru Papua. Sebangun dengan Wilayah Adat.* diakses dari <https://www.indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/sosial/provinsi-baru-papua-sebangun-dengan-wilayah-adat>.